



**Judul** : Pemerintah Kejar Realisasi RUU PDP  
**Tanggal** : Sabtu, 09 Oktober 2021  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 12

| LEGISLASI |

# Pemerintah Kejar Realisasi RUU PDP

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan sejumlah langkah untuk mematangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), menyusul langkah DPR memperpanjang pembahasan aturan itu.

Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi mengatakan, terkait hal itu, pemerintah terus melakukan pendalaman atas isu-isu krusial RUU PDP, mengkaji dan mempersiapkan substansi aturan turunan, seraya mengawasi perlindungan data pribadi melalui instrumen hukum yang tersedia.

“Dinamika pembahasan bersama DPR untuk menghasilkan UU PDP yang dapat memenuhi kebutuhan perlindungan data pribadi saat ini dapat memengaruhi target penyelesaian RUU PDP. Namun, Pemerintah terus berupaya agar RUU PDP dapat diselesaikan sesuai target,” katanya, Jumat (8/10).

Dia melanjutkan, Kementerian

Kominfo dan DPR sepakat membahas RUU PDP secara optimal, sehingga produk hukum ini dapat memenuhi kebutuhan peyelenggaraan perlindungan data pribadi.

Sementara itu, dia menggarisbawahi bahwa alasan belum rampungnya regulasi perlindungan data tersebut lantaran dinamika diskusi dalam pembahasan turut mewarnai proses pengesahan RUU PDP. Namun, dia memastikan Kominfo terus melakukan upaya proaktif untuk mempercepat proses penyelesaian pembahasan RUU PDP.

“Perlu kami sampaikan bahwa payung hukum perlindungan data pribadi sudah tersedia di berbagai regulasi *existing* di antaranya UU ITE beserta peraturan turunannya.”

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pembahasan RUU PDP masih mengalami kebuntuan. Salah satunya karena Kemkominfo menginginkan otoritas pengawas data pribadi di

bawah kementerian.

Sementara itu, DPR RI menginginkan otoritas ini langsung di bawah presiden karena turut mengawasi pengendali data publik.

“Saat ini proses masih menunggu respon dari tim pemerintah, utamanya adalah kelembagaan pengawas data pribadi,” katanya.

Menurut Bobby, jika berkaca pada negara lain, otoritas pengawas data pribadi berada di lembaga independen. Oleh sebab itu, pembahasan RUU PDP diserahkan kembali kepada pemerintah.

Sekadar informasi, DPR memutuskan untuk memperpanjang waktu pembahasan RUU PDP. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021—2022.

Pembahasan akan kembali dilakukan setelah masa reses selesai. Adapun, DPR akan memulai masa reses mulai 8 Oktober nanti selama masa sebulan ke depan. (Akbar Evandio)